

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian peneliti setelah melihat dan menganalisis sumber bahan hukum yang ada, baik dari regulasi, sampai dengan implementasi regulasi yang ada terkait dengan judul penelitian rekonstruksi hukum *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

1. Pengaturan *E-Voting* berkesesuaian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
2. Rekonstruksi hukum *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, meliputi: perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar:

1. KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
2. Penerapan *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak harus mempertimbangkan kondisi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penertbit Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal:**

- Adityo Susilo. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7. No. 1. Maret 2020.
- Amanda Adelina Harun & Fenty U. Puluhulawa. *The Trips Safeguards: Antara Hak Eksklusif Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Al-Himayah. Volume 2. No. 2 Oktober 2018.
- Achmad Arufulloh. *Pelaksanaan PILKADA serentak yang demokratis, Damai dan bermartabat*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume II. o. 2. Mei - Agustus 2015.

- Ali Marwan Hsb. *Pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan Putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-ix/2013*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 03. September 2016.
- Affan Sulaeman. *Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 1. April 2015.
- Arry Bainus & Junita Budi Rachman. *Pandemi Penyakit Menular (COVID-19) Hubungan Internasional*. Journal of International Studies. Vol. 4. No. 2. Mei 2020.
- Erlina Burhan. *Coronavirus yang Meresahkan Dunia*. Februari. Volume 70. No. 2. Februari 2020.
- H.M. Soerya Respationo. *Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral*. Jilid 42. No 3. Juli 2013
- Haryati, Kusworo Adi, Suryono. *Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting*. Jurnal sistem informasi bisnis. 17 maret 2014.
- Harma Oktafia Lingga Wijaya. *Voting Berbasis Website Pada Pemilihan Kades Di Rantau Jaya (Lake) Dengan Keamanan Data Menggunakan Enkripsi Base 64*. Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK). Vol. 2. No. 1 Juli 2017.
- I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi. *Analisis yuridis pemilihan kepala desa berbasis E-Voting pada pemilihan kepala desa di kabupaten jembrana*. Jurnal Kertha Negara. Vol. 8. No. 8. Tahun 2020.
- Loura Hardjaloka. *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8. No. 4. Agustus 2011.
- Muhammad Habibi. *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*. Article. June 2018.

- Muhammad Kifli Hutagalung. *Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-Ktp*.  
Jurnal Saintikom Vol. 11. No. 1. Januari 2012.
- Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu. *Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi*.  
Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 15. No. 1. Januari-Juni 2020.
- Nur Mohamad Kasim. *Aspek Politik Hukum Dari Uu Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengeolaan Zakat*. Jurnal Legalitas. Volume 2. No. 1. Februari 2009.
- Nopyandri. *Pemilihan kepala daerah yang demokratis Dalam perspektif UUD 1945*. Jurnal ilmu hukum. Volume 2. No. 2. 11 Februari 2011.
- Nurul Istiqamah. *Sistem Keamanan E-Voting Menggunakan Fungsi Hash Dan Algoritma One Time Pad*. Skripsi. Semarang Juni 2016.
- Rahmat Teguh Santoso Gobel. *Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidentia Threshold) Dalam Pemilu Serentak*. JALREV. Volume 1. Issue 01. January 2019.
- Ridho Imawan Hanafi. *Pemilihan langsung kepala daerah di indonesia: Beberapa catatan kritis untuk partai politik*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 11. No. 2. Desember 2014.
- Rusdi. *Pandemi Penyakit Dalam Lintasan Sejarah Dan Dampaknya Terhadapgejolak Sosial Politik*. Diakronika. Vol. 20. No. 1. Tahun 2020.
- Shelvie Nidya Neyman. *Penerapan Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. 06 Jurnal Sains Terapan Edisi III. Vol. 3 (1). 2013.
- Yusuf Eko Nahuddin. *Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 8. No. 2 Desember 2017.
- Zamroni Abdussamad. *Kebijakan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Inovasi. Volume 7. No. 3. September 2010.

## **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang PILKADA

Keputusan enteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/247/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (*COVID-19*)

## **Internet:**

<https://m.rri.co.id/gorontalo/polhukam/pilkada-serentak/730447/kpu-provinsi-gorontalo-dorong-dana-hibah-pilkada-2020-efektif-efisien>. Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 15:00 wita.

<https://kab-gorontalo.kpu.go.id/dana-cetak-surat-suara-lebih-dari-rp-200-juta/>.

Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 15:30 wita.

<https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19> Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.  
(25 November – 9 Desember 2020) dan (9 Desember – 23 Desember 2020).  
Jumlah Terpapar Positif Covid-19 Di Gorontalo. Diakses pada Tanggal 1  
Februari 2021. Pukul: 21:30 wita.